

RINGKASAN

DEDDI AGUSRIADI
NIM. 237410101028

**PENYALAHGUNAAN PAS KECIL PADA
KAPAL NELAYAN (Studi Penelitian di
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe)**

(Dr. Malahayati, S.H., LL.M. dan
Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.)

Pas Kecil adalah dokumen yang wajib dimiliki kapal dengan ukuran GT 7 ke bawah untuk legalitas operasionalnya. Pas Kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun, di Lhokseumawe, ditemukan penyalahgunaan Pas Kecil, seperti pemalsuan dan penggunaan dokumen tidak sesuai standar, yang merugikan nelayan taat aturan dan berdampak pada eksploitasi sumber daya laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penyalahgunaan Pas Kecil dan upaya penanggulangannya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman serta rekomendasi dalam meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kapal nelayan yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yuridis empiris dan bersifat preskriptif, dengan sumber pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan serta hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan objek permasalahan dari penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyalahgunaan Pas Kecil di KSOP Kelas IV Lhokseumawe meliputi penggunaan dokumen kapal yang sudah tidak beroperasi lagi, serta pemakaian Pas Kecil oleh kapal lain untuk memperoleh subsidi BBM. Studi kasus Nadia Rezeki 02 dan Tiger PLB menunjukkan dampak pada kerugian negara, subsidi yang tidak tepat sasaran, dan keselamatan pelayaran. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya pengawasan, tiadanya inspeksi lapangan, rendahnya kesadaran hukum, dan tekanan ekonomi. Temuan ini menegaskan perlunya pembenahan sistem pengawasan dan administrasi Pas Kecil secara menyeluruh.

Disarankan kepada Pemerintah perlu memperkuat sistem verifikasi melalui inspeksi fisik kapal secara berkala dan digitalisasi data kapal yang terintegrasi antar instansi. Proses pengukuhan Pas Kecil harus didahului dengan pemeriksaan fisik kapal yang riil dan validasi lapangan. Selain itu, edukasi hukum kepada nelayan serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat pengawas perlu diutamakan, disertai penerapan sanksi tegas untuk mendukung sistem perizinan kapal kecil yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Penanggulangan, Penyalahgunaan, Surat Kapal, Pas Kecil, Kapal Nelayan.

SUMMARY

DEDDI AGUSRIADI
NIM. 237410101028

**PENYALAHGUNAAN PAS KECIL PADA
KAPAL NELAYAN (Studi Penelitian di
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe)**

(Dr. Malahayati, S.H., LL.M. dan
Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.)

Small Pass is a document that must be owned by ships with a size of GT 7 and below for their operational legality. Small Pass is regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. However, in Lhokseumawe, there is still misuse of Small Pass such as forgery and issuance of documents that do not meet standards, which harms fishermen who obey the rules and has an impact on the exploitation of marine resources. This study aims to examine the forms of misuse of Small Pass and efforts to overcome them at the Harbor Master's Office and Class IV Port Authority of Lhokseumawe. The aim is to provide an understanding and recommendations for improving supervision and management of sustainable fishing vessels.

This study uses a method with a qualitative research type, an empirical and prescriptive legal approach, with data collection sources through primary data and secondary data and using data collection tools, namely interviews, documentation, and literature studies and the research results are arranged systematically to obtain clarity on the problem objects of the research.

The results of the study indicate that the Misuse of Small Passes at KSOP Class IV Lhokseumawe includes falsification of GT sizes, use of documents of ships that are no longer operating, and use of Small Passes by other ships to obtain fuel subsidies. The case studies of Nadia Rezeki 02 and Tiger PLB show the impact on state losses, inappropriate subsidies, and shipping safety. The causal factors include weak supervision, lack of field inspections, low legal awareness, and economic pressure. These findings emphasize the need for a comprehensive improvement of the Small Pass supervision and administration system.

It is recommended that the Government strengthen the verification system through periodic physical inspections of ships and digitalization of ship data integrated between agencies. The Small Pass confirmation process must be preceded by a real physical inspection of the ship and field validation. In addition, legal education for fishermen and increasing the capacity and integrity of supervisory officers need to be prioritized, accompanied by the application of strict sanctions to support a transparent and accountable small ship licensing system.

Keywords: Prevention, Misuse, Ship Certificate, Small Pass, Fishing Vessel.